

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERARUTAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2010
Disampaikan Pada Rapat Paripurna
Rabu, 23 Desember 2009

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenankanlah kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Rancangan Peranturan Daerah tentang APBD Tahun 2010, sebagai berikut :

Pendahuluan

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 30 November 2009, pada tanggal 17 sd. 20 Desember 2009 Badan Anggaran bersama bersama TAPD telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan pembicaraan tingkat ketiga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2010, yang sebelumnya telah dibahas melalui tahap pembicaraan tingkat pertama, pembicaraan tingkat kedua dan pembahasan pendahuluan yang dilakukan oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja terkait.

Dalam pembahasan ini, Badan Anggaran memperhatikan hasil pembahasan yang dilakukan sebelumnya, dimana terdapat cukup banyak masukan, saran dan rekomendasi yang diberikan terkait dengan materi dan substansi dari Rancangan APBD tahun 2010, diantaranya perlunya upaya-upaya yang lebih maksimal untuk mengeksplorasi pendapatan daerah, oleh karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang sangat urgen namun belum mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan target kinerja RPJMD, terdapat beberapa usulan kegiatan yang sangat urgen, namun belum tertampung atau belum mendapatkan alokasi anggaran yang mencukupi.

Dengan memperhatikan masukan-masukan yang terdapat dalam pembahasan sebelumnya, maka mekanisme pembahasan Rancangan APBD tahun 2010 yang dilaksanakan Badan Anggaran bersama TAPD disusun sebagai berikut :

- a. Melakukan pembahasan terhadap sektor pendapatan, dengan tujuan untuk mengali sumber-sumber pendapatan secara lebih komprehensif melalui kalkulasi yang lebih akurat terhadap semua potensi sumber penerimaan daerah.
- b. Melakukan pembahasan terhadap sektor belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, dengan tujuan untuk dapat mengefektifkan dan

mengefisienkan belanja daerah agar dapat mencapai sasaran yang akan diwujudkan serta mengsinkronisasikan belanja dengan kebutuhan dan target kinerja RPJMD.

Kegiatan pembahasan Rancangan APBD tahun 2010 ini berlangsung dengan alot dan penuh dinamika dengan analisa yang kritis dan tajam, baik Badan Anggaran maupun dari TAPD. Namun berkat adanya cara pandang yang sama serta semangat kebersamaan untuk merampungkan pembahasan sesuai dengan jadwal, maka kegiatan pembahasan ini dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Adapun Hasil pembahasan antara Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Rancangan APBD Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

A. Pembahasan Pendapatan Daerah

Dalam KUA dan PPAS APBD tahun 2010, proyeksi total pendapatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.622.679.120.250,- yang terdiri dari :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah sebesar | Rp. 813.467.154.000,- |
| 2. Dana Perimbangan sebesar | Rp. 769.696.966.250,- |
| 3. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar | Rp. 39.515.000.000,- |

Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, diperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp. 38.647.902.500,- sehingga total proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 1.655.727.672.750,-, yang bersumber dari :

1. Tambahan retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD Solok, sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan RSAM Bukittinggi sebesar Rp. 775.000.000,-. Dengan adanya tambahan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan ini tidak akan mengganggu fungsi Rumah Sakit serta tidak akan mengurangi kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Tambahan klaim asuransi PT. Askrida terhadap kerusakan gedung pemerintah pasca gempa sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Meskipun terdapat tambahan klaim asuransi ini, Badan Anggaran merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah mengundang Direksi PT. Asuransi Askrida untuk membahas dan menghitung secara lebih detail besaran klaim asuransi yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani perjanjian yang tercantum dalam polis asuransi yang telah disepakati.
3. Tambahan pendapatan dari retribusi tera/tera ulang pada Dinas Koperasi, Perindang sebesar Rp. 20.000.000,-
4. Tambahan pendapatan dari retribusi penjualan produksi daerah dari Balai Benih Ikan (BBI) sebesar Rp. 10.000.000,-
5. Tambahan pendapatan dari penjualan produksi daerah (bibit sawit dan keret) pada BP2MB sebesar Rp. 148.725.000,-. Untuk lebih mendorong peningkatan fungsi BP2MB dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang

bergerak di sektor perkebunan, Badan Anggaran merekomendasikan perlu dilakukan revitalisasi pada BP2MB baik terhadap peningkatan sarana dan prasarana maupun terhadap peningkatan kualitas SDM.

6. Tambahan pendapatan dari penjualan produksi daerah pada Dinas Peternakan sebesar Rp. 100.000.000,-
7. Tambahan pendapatan dari bagi laba penyertaan modal pada PT. Grafika sebesar Rp. 350.000.000,- dan PT. Dinamika sebesar Rp. 47.000.000,-. Terhadap BUMD ini Badan Anggaran menilai bahwa kinerja BUMD belum memuaskan dilihat dari perbandingan laba yang disetor dengan dana yang diinvestasikan. Memperhatikan hal tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan untuk membentuk Pansus yang akan mengevaluasi kinerja dan keberadaan BUMD.
8. Tambahan dari retrubusi sewa mess pemda dan aula Istana Bung Hatta sebesar Rp. 14.827.500,-.
9. Tambahan sumbangan pihak ketiga dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 600.000.000,-. Terhadap sumbangan yang diberikan oleh PT. Semen Padang ini, direkomendasikan untuk membicarakan kembali besaran sumbangan PT. Semen Padang kepada Pemerintah Daerah, oleh karena besaran sumbangan yang diberikan sebesar Rp. 10/sak masih mempedomani harga semen pada kisaran Rp. 10.000/sak. Hal ini tentu tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, dimana harga semen sudah mencapai Rp. 50.000,-/sak.
10. Tambahan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.534.350.000,
11. Tambahan jasa giro uang daerah yang disimpan pada Bank Nagari sebesar Rp. 3.300.000.000,- dan tambahan deviden sebesar Rp. 2.158.000.000,- Terhadap pemberian jasa giro dan pembagian deviden dari PT. Bank Nagari ini, Badan Anggaran merekomendasikan sebelum dilakukan RUPS PT. Bank Nagari terlebih dahulu Pemerintah Daerah dan DPRD membahas arah kebijakan yang akan dibawa dalam RUPS. Disamping itu Badan Anggaran juga merekomendasikan untuk mendepositokan uang daerah apabila tidak mengganggu likuiditas dan kewajiban pada pihak ketiga serta merekomendasikan kepada Komisi II untuk membahas secara komprehensif dengan PT. Bank Nagari terhadap mekanisme dan perhitungan dalam penetapan deviden dan kewajiban sumbangan pembangunan daerah.
12. Tambahan Silpa sebesar Rp. 13.590.000.000,- yang diperkirakan dari sisa kontrak dan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2009.

Disamping dapat meningkatkan tambahan pendapatan tersebut, Badan Anggaran juga melihat cukup banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, seperti dari sektor perkebunan dan jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menarik dan mengundang investor besar yang bergerak dari perkebunan sawit untuk membahas pemberian sumbangan pihak

ketiga kepada Pemerintah Daerah serta mengusulkan suku buga jasa giro uang daerah yang disimpan pada PT. Bank Nagari dapat disetarakan dengan SBI.

B. Pembahasan Belanja Daerah

Secara umum, belanja daerah yang diusulkan dalam Rancangan APBD tahun 2010 telah sesuai dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati DPRD bersama Pemerintah Daerah dengan total sebesar Rp. 1.817.068.120.250,- dengan rincian :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 909.191.000.250,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 907.877.120.000,-.

Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, terjadi perubahan alokasi anggaran untuk belanja daerah, dengan rincian :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung semula dialokasikan sebesar Rp. 909.191.000.250,- yang digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota. Setelah dilakukan pendalaman dan pembahasan terjadi peningkatan sebesar Rp. 163.407.116.600,- yang diperuntukan bagi belanja bagi hasil kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Dengan demikian alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung menjadi sebesar Rp. 1.072.598.116.850,-

2. Belanja langsung

Belanja langsung semula dialokasikan sebesar Rp. 907.877.120.000,- yang digunakan untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan, meningkat menjadi Rp. 1.271.633.880.900,- yang disebabkan adanya beberapa tambahan kegiatan yang belum tertampung serta penambahan alokasi anggaran pada kegiatan yang sudah ada, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tambahan kegiatan pada Set. DPRD sebesar Rp. 558.290.900,- terkait dengan pelaksanaan Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 494.290.900,- dan tambahan alokasi dana untuk kegiatan penyediaan alat studio dan komunikasi sebagai pengganti alat yang rusak akibat gempa sebesar Rp. 64.000.000,-.

Meskipun pada Set. DPRD terdapat tambahan alokasi anggaran, namun secara keseluruhan alokasi anggaran pada Set. DPRD berkurang, oleh karena adanya pengalihan kegiatan yang semula ditempatkan di Set. DPRD dialihkan ke DPKD dengan alokasi sebesar Rp. 1.910.800.000,-.

- b. Tambahan kegiatan yang terkait dengan dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat dan dukungan terhadap beberapa kegiatan SKPD yang perlu ditingkatkan

serta dukungan terhadap pelayanan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.915.000.000,-

Berdasarkan hasil pembahasan sektor belanja tersebut, maka alokasi anggaran untuk masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh SKPD dilingkup Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

1). Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pendidikan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 173.384.442.202,-. Dari hasil pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi gedung sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa tanggal 30 September 2009 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.000.000.000,- dialihkan pada Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim.

Dengan adanya pengalihan kegiatan tersebut, maka alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga mengalami perubahan menjadi Rp. 140.384.442.202,-

2). Dinas Kesehatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 55.921.318.231,-. setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan tidak mengalami perubahan, oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan.

Disamping Dinas Kesehatan, penyelenggaraan urusan kesehatan juga dilaksanakan oleh 4 (empat) RSUD, yaitu RSUD Solok, RSUD Pariaman, RSJ HB. Sa'anin dan RSAM Bukittinggi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.779.706.166,-.

Setelah dilakukan pembahasan, terjadi peningkatan alokasi belanja pada RSAM Bukittinggi sebesar Rp. 4.225.000.000,- yang digunakan untuk biaya pelayanan medis serta penyiapan ruang VIP RSAM agar segera dapat dimanfaatkan.

Dari pembahasan yang dilakukan terhadap urusan kesehatan ini, sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh masing-masing RSUD, maka disarankan retribusi biaya pelayanan kesehatan perlu ditinjau kembali oleh karena tidak sesuai lagi dengan kondisi harga alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Namun peninjauan retribusi pelayanan kesehatan ini tetap pada prinsip tidak memberatkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

3). Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 322.313.970.823,-. Setelah dilakukan pembahasan, terdapat

peningkatan alokasi anggaran baik yang disebabkan adanya pengalihan kegiatan rehabilitasi sekolah yang rusak maupun adanya penambahan kegiatan pembangunan infrastruktur terutama untuk pemulihan kondisi daerah pasca gempa, dengan tambahan dana sebesar Rp. 56.250.000.000,-.

4). Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas PSDA dialokasikan anggaran sebesar Rp. 91.436.197.876. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran yang disediakan telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas terkait.

5). Bappeda

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan yang diselenggarakan oleh Bappeda dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.438.008.314,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD terkait.

6). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.557.293.035,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.

7). Bapedalda

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Bapedalda dialokasi anggaran sebesar Rp. 6.439.136.002,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.

8). Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan KB yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.003.603.465,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.

9). Dinas Sosial

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan sosial dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.109.131.678,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait. Namun Badan Anggaran merekomendasikan anggaran biaya makan untuk anak panti yang semula sebesar Rp. 16.500,-

ditingkatkan menjadi Rp. 20.000,-. Untuk menutupi kekurangannya akan ditampung pada Perubahan APBD tahun 2010.

- 10). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan ketenaga kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dialokasi anggaran sebesar Rp. 28.815.733.488,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
- 11). Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah dan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.952.321.261,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
- 12). BKPM
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.929.422.942,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
- 13). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.766.755.230,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait. Namun demikian Badan Anggaran merekomendasikan agar anggaran yang dialokasikan dapat mendukung dan mendorong peningkatan kepariwisataan di Sumatera Barat serta merekomendasikan kepada Komisi IV untuk membahas lebih lanjut kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepariwisataan dan kebudayaan.
- 14). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpolinmas dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.198.611.431,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
- 15). Satuan Polisi Pamong Praja
Untuk mendukung pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.693.874.046,-. Setelah dilakukan pembahasan,

alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.

- 16). **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Badan Diklat, Kantor Penghubung dan DPKD** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 509.171.194.739,- Setelah dilakukan pembahasan, terdapat penambahan kegiatan pada Sekretariat DPRD dan DPKD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 558.290.900,-.
- 17). **Badan Ketahanan Pangan**
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.805.774.863,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
- 18). **Badan Perpustakaan dan Arsip**
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.991.921.163,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
- 19). **Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan**
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pertanian dan pendidikan disektor pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 51.971.842.900,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
- 20). **Dinas Perkebunan**
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.569.067.311,- Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
- 21). **Dinas Peternakan**
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.731.529.681,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
- 22). **Dinas Kehutanan**
Untuk mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.333.255.140,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak

mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.

23). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.667.899.679,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.

24). Dinas Kelautan dan Perikanan

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.964.896.712,-. Setelah dilakukan pembahasan, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan oleh karena telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.

C. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang berisikan Sisa lebih perhitungan tahun lalu yang semula sebesar Rp. 236.410.000.000,- terjadi peningkatan sebesar Rp. 13.590.000.000,-. Namun diakhir pembahasan terjadi lagi penambahan Silpa yang disebabkan adanya pemasukan dana penanggulangan bencana ke Kas Daerah yang diperkirakan masuk pada akhir tahun 2009 ini, dengan rincian :

1. Bantuan Dana Bencana Tahap III Tahun 2007 sebesar Rp. 153.940.700.000,-
2. Dana PNPB sebesar Rp. 313.933.950.000,-
3. Dana rehab dan rekonstruksi pasca bencana tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 23.450.675.000,-.

Dengan adanya tambahan pemasukan pada kas daerah tersebut, maka total Silpa menjadi Rp.741.325.325.000,-. Meskipun terdapat penambahan Silpa yang cukup besar, namun perlu diketahui bahwa penambahan tersebut terjadi oleh karena adanya pemasukan dana bantuan penanggulangan bencana dari Pemerintah pada kas daerah diakhir tahun yang sudah ada peruntukannya dan bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja pemerintah daerah.

D. Pengeluaran Daerah

Pada Pos pengeluaran pembiayaan, semula dialokasikan anggaran sebesar Rp 42.021.000.000,-. Setelah dilakukan pembahasan terjadi peningkatan sebesar Rp. 10.600.000.000,- yang diperuntukan untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT. Bank Nagari sebesar Rp. 10.000.000.000,- agar proposi kepemilikan saham tidak menurun serta untuk menambah penyertaan modal pada PT. Dinamika Jaya Sumbar sebesar Rp. 600.000.000,- untuk rehabilitasi SPBU sesuai dengan permintaan PT. Pertamina.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari dan PT. Dinamika Jaya Sumbar tersebut, maka jumlah pengeluaran pembiayaan semula Rp. 42.021.000.000,- meningkat menjadi Rp. 52.821.000.000,-.

Dari hasil pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan, disamping telah berhasil merumuskan pendapatan dan belanja daerah serta memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah, Badan Anggaran juga memberikan beberapa tambahan rekomendasi diantaranya perlunya mengevaluasi kembali upaya-upaya yang akan dilakukan dalam menuntaskan pembangunan masjid raya, mengevaluasi keberadaan aset-aset daerah serta perlunya dibentuk Pansus untuk mengevaluasi kinerja dari BUMD yang selama ini dinilai masih belum dikelola secara profesional.

Hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD tersebut, telah dibahas pula dalam Rapat Gabungan Komisi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2009. Setelah mendapat beberapa penyempurnaan, Rapat Gabungan Komisi merekomendasikan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2009 dapat dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan.

E. Ringkasan Rencana APBD tahun 2010.

Dari hasil pembahasan terhadap Rancangan APBD Tahun 2010 tersebut diatas, maka diperoleh ringkasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.655.727.672.750,-
a. PAD	Rp. 845.915.706.500,-
- Pajak Daerah	Rp. 621.488.455.000,-
- Retribusi daerah	Rp. 28.015.344.500,-
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 44.379.907.000,-
- Lain-lain PAD	Rp. 152.032.000.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 769.696.966.250,-
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp. 87.777.450.000,-
- Dana Alokasi Umum	Rp. 661.617.385.000,-
- Dana Alokasi Khusus	Rp. 19.220.500.000,-
- Dana Tambahan Penghasilan Guru	Rp. 1.081.631.250,-
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp. 40.115.000.000,-
2. Penerimaan Pembiayaan (Silpa)	Rp. 741.325.325.000,-

3. Belanja Daerah	Rp. 2.344.231.997.750,-
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.072.598.116.850,-
b. Belanja Langsung	Rp. 1.271.633.880.900,-
4. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 52.821.000.000,-
- Penyertaan Modal	Rp. 15.600.000.000,-
- Sisa lebih tahun berjalan	Rp. 37.221.000.000,-
5. Total APBD	Rp. 2.397.052.997.750,-

Demikianlah laporan Badan Anggaran ini yang dapat disampaikan pada Rapat Paripurna ini.

Padang, 23 Desember 2009


BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT

KETUA,



Ir. YULTEKHNIL.MM.

SEKRETARIS,



Drs. NASRAL ANAS